

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional (daerah). Menurut Todaro (dalam Yunitasari, 2007) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam kisaran angka 4% - 6,5% selama kurun waktu antara tahun 2000–2011.

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang dan jasa kepada penduduk (Yunitasari, 2007). Menurut Todaro (2003) berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut diwujudkan dalam 3 komponen utama. Pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal manusia

atau sumberdaya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang selanjutnya akan menambah jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi yang dalam pengertian sederhananya terjadi karena ditemukannya cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani suatu pekerjaan (dalam Pambudi, 2013).

Pertumbuhan ekonomi meningkatkan persediaan sumberdaya yang dibutuhkan pembangunan manusia. Peningkatan sumberdaya bersama dengan alokasi sumberdaya yang tepat serta distribusi peluang yang semakin luas, khususnya kesempatan kerja akan mendorong pembangunan manusia lebih baik. Hal ini berlaku juga sebaliknya, pembangunan manusia mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Ramirez, et.al, 1998; Brata, 2004 dalam Matahariku1, 2009).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.
2. Faktor Sumber Daya Alam Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya.

Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan.
4. Faktor Budaya Faktor budaya dapat berfungsi sebagai pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan.
5. Sumber Daya Modal Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK.

gender yang dialami kaum perempuan membatasi pilihan perempuan untuk berkontribusi pada pembangunan dan menikmati pembangunan. Pada akhirnya keberhasilan pembangunan adalah kesejahteraan bagi masyarakatnya, tidak terkecuali kaum perempuan. Era globalisasi dan demokrasi saat ini terbuka lebar bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dalam pembangunan. Setiap individu berhak berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah

diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing

Pembangunan ekonomi di suatu negara tidak bisa lepas dari keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat, termasuk peranan perempuan. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat hasil pembangunan di suatu negara adalah peningkatan peran perempuan, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Dalam tiga dekade terakhir, populasi perempuan di dunia telah mencapai setengah dari total penduduk di hampir setiap Negara. Perempuan sebagai salah satu anggota keluarga mempunyai tugas dan fungsi dalam mendukung keluarga. Tugas dan fungsi perempuan identik dengan pekerjaan dalam rumah tangga.

Perempuan hanya dianggap berperan sebagai ibu rumah tangga yang melahirkan keturunan, mengasuh anak dan melayani suami. Sedangkan laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Meskipun saat ini sudah semakin banyak perempuan yang masuk dalam pasar tenaga kerja, namun partisipasi perempuan masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki, baik dalam angkatan kerja maupun pencapaian tingkat pendidikan dan juga keahlian (Psacharopoulos & Tzannatos, 1989). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal apabila kesetaraan gender antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki dapat ditingkatkan, maka pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di suatu negara juga dapat meningkat.

Secara umum, tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor internal, faktor eksternal dan faktor relasional. Faktor internal bersumber dari dalam diri,

terutama bagi perempuan yang berpendidikan tinggi. Faktor eksternal seperti dukungan dari suami dan kehadiran seorang anak serta faktor relasional seperti kebutuhan finansial dan kebutuhan 2 aktualisasi diri (Rini, 2002).

Tingginya TPAK perempuan dalam kegiatan ekonomi disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya perubahan pandangan dan sikap masyarakat tentang sama pentingnya pendidikan bagi laki-laki dan perempuan serta perlunya partisipasi perempuan dalam pembangunan, adanya kemauan perempuan untuk mandiri dalam bidang ekonomi, adanya kemauan untuk membiayai kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya dengan biaya sendiri, adanya kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga serta makin meluasnya kesempatan dalam dunia kerja bagi perempuan seperti berkembangnya industri kerajinan tangan.

**Tabel 1.1**  
*Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (Persen), 2010-2019*

Pertumbuhan Ekonomi (persen)	
Tahun	Provinsi Gorontalo
2010	7,56
2011	7,71
2012	7,91
2013	7,67
2014	7,27
2015	6,22
2016	6,52
2017	6,73
2018	6,50
2019	6,41
2020	-2

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo*

Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo selama tahun 2010-2019 mengalami fluktuasi, pada tahun 2010 laju

pertumbuhan ekonomi sebesar 7,56 persen dan pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 6,22 persen dan di tahun 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar 6,52 persen di tahun 2016 dan 6,74 persen di tahun 2017 dan di tahun 2019 hanya sebesar 6,41 persen. Angka ini turun jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 6,50 persen. perlambatan ekonomi di Gorontalo salah satunya dipicu adanya musim kemarau panjang pada pertengahan tahun 2019 kemarin. Sehingga nilai tambah tanaman pangan (yang memiliki sumbangan sekitar 21 persen) pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Gorontalo di tahun 2019.

Sumber daya manusia yang dijadikan faktor bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi meliputi banyak hal, salah satunya adalah ketenaga kerjaan. Seperti pada kondisi saat ini, gender dalam memiliki pekerjaan tetap tidak dibedakan, dalam artian bahwa pihak perempuan juga dapat memiliki dan menikmati pekerjaan mereka sebagaimana laki-laki mendapat pekerjaan. Walaupun di Indonesia saat ini, stereotype yang masih berkembang hingga saat ini adalah wanita tidak dianjurkan untuk bekerja layaknya laki-laki pada umumnya dan wanita sebaiknya mengurus rumah mereka dan tidak diperkenankan banting tulang seperti laki-laki.

Hal ini masih terjadi di kalangan keluarga-keluarga di lingkungan sekitar dan selalu menjadi persoalan yang lumrah diperdebatkan. Isu kesetaraan gender masih menjadi bahasan yang tidak ada habisnya di negara Indonesia yang mana stigma-stigma yang berkaitan dengan wanita masih marak dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Contoh dari stigma yang berkembang di masyarakat

Indonesia adalah seperti penjelasan diatas tadi yaitu tentang perempuan mencari pekerjaan. Menurut Sri Mulyani ,Menteri Keuangan (Artha, 2019) , masih ada pemikiran bahwa perempuan lebih cocok menjadi ibu rumah tangga daripada mencari pekerjaan seperti layaknya laki-laki.

Karena Stigma yang beredar tersebut masih menjadi suatu kepercayaan banyak orang seperti contoh orang tua mereka, menjadikan angka angkatan kerja wanita masih terbilang rendah. Stigma yang banyak dikembangkan tersebut berlawanan dengan karya ilmiah yang dikembangkan oleh berbagai pihak. Salah satu dari karya ilmiah tersebut adalah dari Duflo (2012) yang menyimpulkan bahwa pemberdayaan pada perempuan dan pembangunan ekonomi saling terikat satu sama lain.

Artinya, ketika pembangunan ekonomi akan mempengaruhi atau terikat pada pemberdayaan perempuan, juga pemberdayaan wanita akan membawa perubahan yang mana akan berdampak langsung pada pembangunan ekonomi. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Bryant (2004), yang menyimpulkan bahwa dengan meningkatkan partisipasi angkatan kerja wanita, maka GDP (Gross Domestic Product) juga akan meningkat.

Namun perlu digaris bawahi juga bahwa ada faktor penyebab stigma yang marak keluar tersebut juga karena adanya Cultural Factor ( Faktor Budaya ), termasuk pada nilai-nilai agamis dan juga Ethnic Attitudes yang bisa mempengaruhi pada tingkat angkatan kerja wanita (Appiah, 2018). Kemungkinan yang terjadi adalah berkembangnya stigma masyarakat terhadap wanita yang bekerja didasari oleh budaya setempat dan juga nilai agamis yang masih

menganggap bahwa wanita tidak perlu bekerja dan cukup menjadi ibu rumah tangga yang baik.

**Tabel 1.2**  
**Angkatan Kerja Perempuan**

Angkatan Kerja Perempuan (Persen)	
Tahun	Provinsi Gorontalo
2010	159.774
2011	165.294
2012	162.610
2013	160.527
2014	178.833
2015	187.513
2016	221.861
2017	198.717
2018	221.652
2019	218.889
2020	223.534

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 20021*

Menurut data yang diperoleh dari BPS, angkatan kerja perempuan di Provinsi Gorontalo mengalami perubahan dari tahun-ketahun khususnya di tahun 2010-2019 yang mana pada tahun 2010 sampai tahun 2015 angkatan kerja mengalami peningkatan dalam pertahun dan tahun 2016 angkatan kerja perempuan berada di tingkat tertinggi sebesar 221.861 dan di tahun 2017 tenaga kerja perempuan mengalami penurunan sebesar 198.717 dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2018 sebesar 221.621 kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan angkatan kerja perempuan sebesar 218.889. Hal ini menjadikan adanya ketertarikan dalam penelitian ini bahwa angkatan kerja wanita mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena secara teori pertumbuhan



penduduk dan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam pertumbuhan ekonomi.

Penduduk usia produktif diharapkan memiliki dan atau melakukan kegiatan ekonomi agar terjadi pertumbuhan pendapatan perkapita yang mendorong terciptanya perekonomian yang sehat. Referensi penelitian yang dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa penduduk usia produktif bereperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, oleh karena itu kualitas sumber daya manusia dari segi kemampuan teknis dan non teknis menjadi penting. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut salah satunya dapat diupayakan melalui kegiatan pendidikan formal, diantaranya adalah pendidikan Sekolah Dasar, Menengah dan Atas, yang mana berdasarkan kajian referensi menunjukkan bahwa komponen pendidikan tersebut menjadi penunjang dalam usaha peningkatan perekonomian suatu negara.

Pentingnya pendidikan yang memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi membuat Provinsi Gorontalo sebagai provinsi penunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia perlu berperan aktif dalam mendorong terciptanya angka partisipasi pendidikan yang tinggi. Tercatat bahwa hingga sampai saat ini angka partisipasi sekolah pada tingkat SMA belum tercapai secara maksimal.

**Tabel 1.3**  
**Angka Partisipasi Murni Tingkat SMA/MA**

<b>Angka Partisipasi Murni Tingkat SMA/MA (persen)</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>
2010	39.15
2011	44.46
2012	45.47
2013	48.91
2014	56.07
2015	56.24
2016	56.37
2017	56.82
2018	57.38
2019	57.52
2020	57.86

**Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2021**

Pemanfaatan kemampuan perempuan dan peningkatan partisipasi mereka dalam perekonomian dapat menjadi kebijakan ekonomi yang cerdas untuk pemulihan. Penekanan pada keterampilan dan penciptaan pekerjaan yang memanfaatkan angkatan kerja perempuan di Indonesia bukan hanya akan mendukung pertumbuhan jangka pendek yang lebih besar, melainkan juga akan memastikan bahwa investasi untuk modal manusia direalisasikan sepenuhnya. Hal tersebut dapat difokuskan pada bidang-bidang berikut ini:

1. Upaya untuk mendukung kemajuan Indonesia dalam mengatasi kesenjangan di pasar tenaga kerja dapat mencakup penanganan faktor-faktor hukum, sosial-budaya dan ekonomi yang membuka kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Misalnya, kesenjangan upah bagi perempuan mencapai 30 persen di sektor formal, dan

bahkan sampai 50 persen di sektor informal, di mana sebagian besar ketimpangan tersebut disebabkan oleh praktek-praktek diskriminatif. Upaya mengurangi kesenjangan gender seperti ini dapat membantu mempertahankan perempuan dalam angkatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

2. Memperlakukan pelayanan pengasuhan anak sebagai infrastruktur yang penting. Investasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk Pendidikan Anak Usia Dini juga dapat mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Analisis terbaru Bank Dunia di Indonesia memperlihatkan bahwa setiap penambahan sarana prasekolah negeri untuk 1.000 anak meningkatkan lapangan kerja bagi kaum ibu sebesar 13 persen. Maka, memberikan akses yang lebih baik kepada lebih banyak ibu untuk mendapatkan pelayanan penitipan anak (childcare) yang mereka percayai merupakan pilihan kebijakan yang baik bagi Indonesia. Hal tersebut juga mendatangkan manfaat positif tambahan bagi kesejahteraan dan perkembangan anak, sehingga menjadi solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.

Jumlah penduduk perempuan di Provinsi Gorontalo saat ini merupakan kelompok usia produktif 15-64 tahun, ada potensi yang sangat besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menghapuskan rintangan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam perekonomian.

**Tabel 1.4**  
**Usia Produktif Perempuan**

<b>Usia Produktif Perempuan (Persen)</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>
2010	
2011	352.290
2012	359.906
2013	349.208
2014	374.373
2015	381.395
2016	388.199
2017	394.805
2018	374.057
2019	407.040
2020	411,648

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2021*

Melihat latar belakang diatas maka penelitian tertarik melakukan penelitian dengan judul “ ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI GORONTALO”.

### **1.2 Rumusan Masalah:**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Seberapa besar pengaruh partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo ?
2. Seberapa besar pengaruh pesentase APM perempuan tingkat SMA terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo?
3. Seberapa besar pengaruh usia produktif perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo?

4. Seberapa besar pengaruh produktifitas tenaga kerja perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo

### **1.3 Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi angkatan kerja perempuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pesentase APM perempuan tingkat SMA terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo?
3. Untuk mengetahui pengaruh usia produktif perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo ?
4. Untuk mengetahui pengaruh produktifitas tenaga kerja perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.2.1 Manfaat teoritis**

diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang. Diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

#### **1.2.2 Manfaat praktis**

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan terhadap perempuan yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.